

**PERAN SISTEM PRANATA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK MASYARAKAT KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

Erwin Wijaya¹, Halikin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova
wijayaerwin73@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi, peran dan fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelesaian konflik sosial yang ada dalam wilayah administratif Kecamatan Brang Rea. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan konsep Pranata Sosial dan Konflik Sosial Masyarakat guna memahami rumusan masalah yang menjadi tujuan dari artikel ini. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan jenis sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan dari narasumber atau responden di lapangan. Sedangkan Data Sekunder yang dikumpulkan berupa dokumentasi hasil penelitian dan informasi dari narasumber atau responden yang berasal dari badan ataupun instansi pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah (1) eksistensi pranata sosial dalam rangka pencegahan konflik sosial masyarakat Brang Rea cukup berperan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, terutama jenis pranata adat, budaya, dan keluarga. (2) fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pencegahan dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat brang rea belum berjalan secara maksimal karena beberapa institusi sosial yang menjalankan pranata sosial dengan fungsi tugas yang sangat spesifik dalam masyarakat. Institusi sosial tersebut didesain hanya untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu sehingga dalam penerapan pranata sosialnya tidak mampu menyentuh dalam pencegahan konflik sosial. Disamping itu pengetahuan serta kapasitas anggota institusi sosial dalam mengembangkan fungsi dari pranata sosial dimasyarakat yang masih rendah. Selain itu juga beberapa pranata sosial telah mengalami penurunan retensi akibat terjadinya pergeseran budaya sehingga melemahkan eksistensi pranata sosial tersebut beserta fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan zaman sehingga melunturkan nilai-nilai budaya masyarakat Sumbawa Barat saat ini.

Kata Kunci: Pranata Sosial, Konflik Sosial Masyarakat, Kecamatan Brang Rea

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi dalam penghidupan tata kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan dapat timbul berbagai konflik sosial. Dan, jika konflik sosial tersebut dibiarkan begitu saja, selain akan menjadi lebih besar dan berkembang, juga akan menjadi kendala dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial merupakan suatu fenomena sosial yang mempunyai berbagai dimensi. Pada umumnya permasalahan sosial sering ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini menyebabkan mereka tidak atau kurang dapat melaksanakan peran dan fungsinya di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ketahanan sosial masyarakat, kelompok masyarakat penyandang konflik kesejahteraan sosial merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi dan mendapatkan dukungan sosial dalam komunitas. Oleh sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kenyataannya berbagai upaya tersebut ternyata belum sepenuhnya berhasil atau bisa mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, ada komunitas/masyarakat yang dengan cara dan mekanisme masing-masing mampu mengatasi sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, masyarakat tersebut masih tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun dalam kondisi yang kurang memadai.

Komunitas atau masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi ternyata memiliki nilai-nilai atau norma yang dapat mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang sering disebut pranata sosial. Hal ini berarti nilai-nilai dan norma tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memberikan kontribusi pada penanganan konflik kesejahteraan sosial.

Pranata sosial secara fisik memang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, terutama bila hal itu berfungsi dengan baik (Mu'man Nuryana, 2003). Pranata sosial memiliki bentuk dan keragaman sesuai dengan peran dan

fungsinya. Keragaman tersebut harus dilihat sebagai khasanah sosial yang dapat dijadikan sebagai modal sosial (*social capital*) di dalam proses pembangunan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana keragaman pranata sosial dapat sinergi sehingga mampu memberikan kontribusi pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah Bahari dengan Kawasan laut yang berpotensi untuk pengembangan *coastal marine culture* tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tano, Seteluk, Taliwang, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Selain ke enam kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan lain yang di Kabupaten Sumbawa Barat yang menganut dan mengembangkan budaya lokal asli Sumbawa Barat (*local culture*) yakni kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Sehingga dari dasar budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat maka secara alami akan merefleksikan sistem pranata sosial yang dikembangkan dan difungsikan sesuai dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Di dalam kehidupan masyarakat, sistem pranata sosial yang dikembangkan relatif beragam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Setidaknya di dalam masyarakat terdapat lima pranata atau lembaga sosial yang pokok, yaitu: (1) keluarga, (2) pendidikan, (3) ekonomi, (4) politik, dan (5) agama. Namun, menurut ahli antropologi seperti Koentjaraningrat (1990), di luar lembaga pokok yang telah disebutkan tadi, terdapat pranata lain, seperti: pranata ilmiah, pranata keindahan, dan juga pranata rekreasi. Dalam karya klasik tokoh sosiologi Talcott Parsons dan Edward Shills (1951), dinyatakan bahwa proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu, proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Parsons dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia.

Pencegahan konflik merupakan upaya yang dilakukan dalam mencegah suatu konflik dengan meningkatkan penerapan UU dan penyesuaian dengan tatanan adat. Perselisihan antar masyarakat sedapat mungkin diselesaikan dengan segera, sehingga tidak menimbulkan keresahan yang menimbulkan sengketa di masyarakat. Konflik bersifat fungsional secara positif dan negatif (Hussein & Al-Mamary, 2019). Umumnya konflik bersifat negatif yang terjadi di masyarakat adalah dapat merugikan masyarakat karena mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Sedangkan konflik yang bersifat positif adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat memperbaiki tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh Lembaga adat agar hukum adat berlaku efektif (Manarisip, 2012). Tatanan adat diatur dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2012, dimana merupakan peran kelembagaan tata cara dalam penanganan konflik sosial.

Penyelesaian konflik sosial di daerah sebaiknya dilakukan dengan mekanisme melalui Lembaga adat. Ketika mekanisme adat telah ditempuh, pemerintah dan semua pihak harus mengakui hasil dari penyelesaian konflik dengan mekanisme pranata adat ini. Namun bila mekanisme yang dilakukan melalui Lembaga adat tidak berhasil, barulah ditempuh melalui mekanisme lainnya.

Pengakuan kelembagaan adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 belum maksimal karena dalam peraturan ini hanya mengakui Lembaga adat yang masih ada, dan peraturan ini tidak mengamanatkan upaya untuk mengembangkan kearifan lokal dalam upaya penyelesaian konflik sosial. Namun dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan untuk memperkuat Lembaga adat dalam melaksanakan fungsifungsi Lembaga adat termasuk fungsi penyelesaian sengketa (Samsul, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah eksistensi, peran dan fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelesaian konflik sosial Masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat”.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan jenis sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari narasumber atau responden di lapangan seperti Kepala Desa, perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemuda. Sedangkan Data Sekunder yang dikumpulkan berupa dokumentasi hasil penelitian dan informasi dari narasumber atau responden yang berasal dari badan ataupun dinas pemerintah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Desa dan instansi terkait lainnya.

Metode pengolahan data atau metode analisis data yang digunakan pada penelitian Fungsi Pranata Sosial Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Rangka Pencegahan konflik sosial masyarakat adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif dengan alat analisis ANSOS (Analisa Sosial). Terdapat dua macam ANSOS menurut Anthony Giddens yaitu Analisis Institusional dan Analisis Perilaku Strategis. Analisis Institusional menekankan kepada keterampilan dan kesadaran aktor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang diproduksi terus menerus, Analisis Perilaku Strategis yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang direproduksi secara sosial. Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk hasil analisis yang dapat berupa penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, gambar dan diagram hasil analisis data. Penelitian Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konflik Sosial Masyarakat Brang Rea

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang

selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

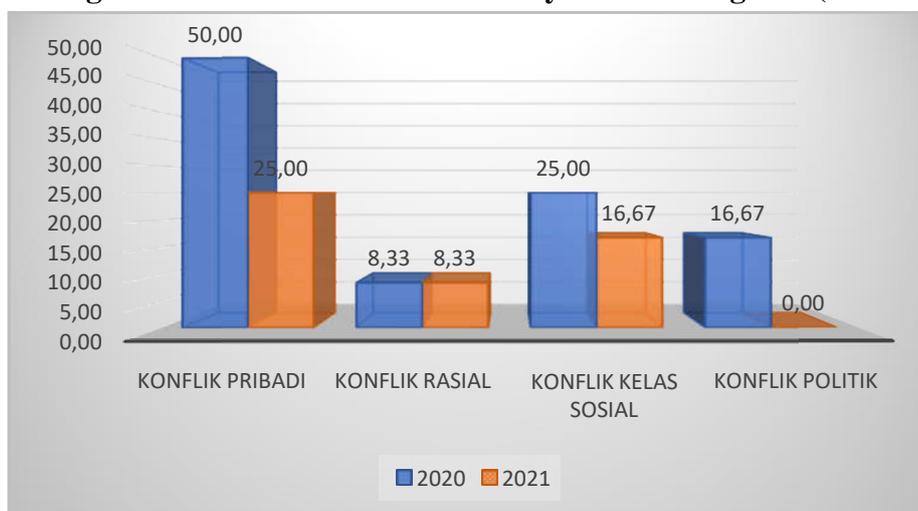
Adapun beberapa bentuk konflik sosial masyarakat yang terjadi di Brang Rea pada tahun 2020-2021 yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa, tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat lainnya serta pihak kepolisian yakni ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel Analisis Konflik Sosial Masyarakat Brang Rea (2020-2021)

Jenis konflik	Jumlah kasus		Persentase (%)	
	2020	2021	2020	2021
Konflik pribadi	6	3	50.00	25.00
Konflik rasial	1	1	8.33	8.33
Konflik kelas sosial	3	2	25.00	16.67
Konflik Politik	2	0	16.67	0.00
Jumlah	12	6	100	100

Berdasarkan tabel di atas maka dilakukan analisis terhadap konflik masyarakat yang terjadi di Brang Rea yakni ditunjukkan pada diagram di bawah ini:

Diagram Analisis Konflik Sosial Masyarakat Brang Rea (Persen)



Berdasarkan diagram di atas maka dapat diketahui bahwa konflik sosial masyarakat yang terjadi di Brang Rea didominasi oleh jenis konflik pribadi bila dibandingkan dengan konflik sosial lainnya. Sedangkan konflik sosial yang paling jarang terjadi adalah konflik rasial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik masyarakat yang terjadi di Brang Rea dipengaruhi oleh lemahnya peran pranata keluarga dalam mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Eksistensi Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Masyarakat

Penanganan konflik sosial merupakan proses menuju pencegahan dan atau penghentian kekerasan serta menemukan pemecahan masalah yang bisa diterima oleh para aktor berkonflik. Penanganan tersebut bisa secara langsung dilakukan oleh pihak berkonflik maupun keterlibatan pihak ketiga (mediator konflik). Proses mencegah dan menghentikan kekerasan, serta mencari pemecahan masalah merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi tata kelola konflik diantaranya sistem kebudayaan, nilai sosial, adat istiadat, kepentingan para aktor, desain kelembagaan sosial politik dan sistem hukum.

Pada kasus-kasus konflik sosial tertentu yang tidak terlalu kompleks dan tanpa dimensi kepentingan yang besar proses penanganan bisa menjadi lebih mudah. Kasus konflik sosial yang lebih kompleks oleh keterlibatan kepentingan besar termasuk kepentingan memperebutkan sumberdaya alam, agraria, identitas, politik, dan keselamatan kolektif komunitas cenderung lebih sulit tertangani. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat sangat heterogen yang secara empiris sering mengalami konflik sosial sarat oleh benturan kepentingan-kepentingan besar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat, aparatur desa dan pihak kepolisian yang dilakukan pada bulan Juni 2021 menggunakan instrumen wawancara terstruktur (Lampiran 1) yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan dikumpulkan, maka diperoleh data konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan Brang Rea serta peran pranata dalam penyelesaiannya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel Analisis Peran Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial
Masyarakat Brang Rea**

Jenis konflik	Eksistensi	Eksistensi pranata sosial	Peran
Konflik Pribadi	Ada	a. Pranata adat b. Pranata agama c. Pranata keamanan d. Pranata kekerabatan	Semua pranata yang eksis berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pribadi yang terjadi seperti konflik sengketa hartawarisan, konflik perkelahan, konflik kekerasan dalam rumah tangga, konflik pencurian, kenakalan remaja, pelecehan, dll.
Konflik rasial	Ada	a. Pranata adat b. Pranata agama c. Pranata keamanan d. Pranata kekerabatan	Semua pranata yang eksis berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rasial yang terjadi seperti: konflik antara masyarakat pribumi dengan pendatang terkait kepemilikan lahan serta budaya.
Konflik kelas sosial	Ada	a. Pranata adat b. Pranata agama c. Pranata keamanan d. Pranata kekerabatan	Semua pranata yang eksis berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik kelas sosial yang terjadi misalnya konflik kepentingan antar lembaga swadaya masyarakat dan konflik antar lembaga pemerintah desa.
Konflik Politik	Ada	a. Pranata adat b. Pranata agama c. Pranata keamanan d. Pranata kekerabatan	Semua pranata yang eksis berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi seperti konflik kepentingan politis baik pribadi maupun kelompok, konflik pemilihan kepala desa, BPD maupun DPRD.

KESIMPULAN

Adapun rumusan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi pranata sosial dalam rangka pencegahan konflik sosial masyarakat memang cukup berperan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, terutama jenis pranata adat, budaya, dan keluarga.
2. Fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pencegahan dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat memang belum berjalan secara maksimal karena beberapa institusi sosial yang menjalankan pranata sosial dengan fungsi tugas yang sangat spesifik dalam masyarakat. Institusi sosial tersebut didesain hanya untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu sehingga dalam penerapan pranata sosialnya tidak mampu menyentuh dalam pencegahan konflik sosial. Disamping itu pengetahuan serta kapasitas anggota institusi sosial dalam mengembangkan fungsi dari pranata sosial dimasyarakat yang masih rendah. Selain itu juga beberapa pranata sosial telah mengalami penurunan retensi akibat terjadinya pergeseran budaya sehingga melemahkan eksistensi pranata sosial tersebut beserta fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan zaman (informasi dan teknologi) sehingga melunturkan nilai-nilai budaya masyarakat Sumbawa Barat saat ini.

REFERENSI

- Astrid Susanto, 2006. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung: Bina Cipta.
- Balai Pustaka, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr. Robert H. Lauer, 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irving M. Zeitlin, 1998. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koentjaraningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusnadi, 2002. Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja. Malang: Taroda.
- Nasikun, 2003. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robert Lawang, 1994. Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Robert, H. Lauer, 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1993. Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 99.
- Soetomo, 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Talcott Parsons & Edward Shils, 1951, Toward A General Theory of Action, New York: Harper & Row.
- Nasikun, 2003. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulsyani, 2012. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Alfauzan Amin. 2014. Madrasah dan Pranata Sosial. Al-Ta'lim, Vol. 13, No. 2,
- Andin H Taryoto 2005 (Penyunting). Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa komoditi Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Anggoro, M. Linggar, 2000. Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2013. Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Ata Ujan, Andre, 2009. Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membangun Keadilan, Yogyakarta: Kanisius.
- Burlian Paisol. 2013. Pranata Sosial. Palembang: Rafah press
- Gunarsa S.D. 2004. Seri Psikologi Bunga Rampai - Psikologi Perkembangan dari Anak sampai Usia Lanjut, BPK Gunung Mulia.
- Harsojo. 1967. Pengantar Antropologi. Jakarta: Binatjipta
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1999. Sosiologi; Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: PT Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, 1971. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Koentjaraningrat. 1979. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- _____. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntjorowati Elly, 2019. Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Jurnal PKS Vol 18 No 2.
- Islam: Pranata Sosial Di Dalam Islam. Malang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM).
- Mu'man Nuryana, 2003. Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Konteks Pengembangan Ketahanan Sosial: Tinjauan Teoritis, Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbang Depsos RI.
- Roebyantho Haryati & Padmiati Ety. 2007. Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03: 33-44.
- Turnanggor Rusmin. 2009. Peran WKSBM dan Puskesmas Dalam Penguatan Pranata-Pranata Sosial Perdesaan. Injormasi, Vol. 14.
- Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. 1986. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yasbit FE UI.
- Sitanggang, B.A. 1999. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Karya Utama.

Soekanto, Soerjono. 1984. Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta:
CV. Rajawali.

Tobing, Fredy B.L. (2002). Aktifitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang
Mengancam Stabilitas Negara. Jurnal Global Politik Internasional, Vol.5
No.1